

Treping System (New Trebit for Bookkeeping System): Implementasi Triple Entry Accounting dalam Sistem Entitas Pendidikan

Muhammad Fitrah Mahaini¹*, Fadhilah Regina Aurel Danessa², Arum Kusumastuti Wulandari³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya (penulis 1 dan korespondensi)
email: muhammadfitrahmahaini@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya (penulis 2)
email: aurelfadilah08@gmail.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya (penulis 3)
email: arumkwulandari@gmail.com

ABSTRACT

Quality education will be the foundation of the government's efforts to encourage the achievement of sustainable development goals and targets in the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) era. One aspect in the education sector that plays an important role in realizing these goals is the use of an appropriate accounting system. The purpose of this study is to analyze the implementation of the triple entry bookkeeping on the accounting system in educational entities. The implementation is considered to have several positive impacts, including: (1) Providing budget information; (2) Automatically validate transactions; (3) Providing an integrated public ledger; and (4) Increase trust and transparency. This research was used library research. The data obtained were analyzed using descriptive analysis techniques with a deductive mindset. The proper and accurate application of triple entry bookkeeping will fundamentally minimize the fault, reduce internal fraud and improve operational efficiency of educational entities as well as improve operational efficiency of educational entities.

Keywords: *Triple Entry, Sistem Akuntansi, Pendidikan*

ABSTRAK

Pendidikan berkualitas akan menjadi tumpuan upaya pemerintah dalam mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Salah satu aspek di sektor pendidikan yang berperan penting untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah penggunaan sistem akuntansi yang tepat guna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *triple entry bookkeeping* terhadap sistem akuntansi dalam entitas pendidikan. Implementasi tersebut dinilai akan menghasilkan beberapa dampak positif antara lain: (1) Menyediakan informasi anggaran; (2) Memvalidasi transaksi secara otomatis; (3) Menyediakan *public ledger* yang terintegrasi; dan (4) Meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penerapan *triple entry bookkeeping* dengan tepat dan akurat, secara fundamental akan meminimalisir resiko kesalahan, mengurangi penipuan internal dan meningkatkan efisiensi operasional entitas pendidikan serta meningkatkan efisiensi operasional entitas pendidikan.

Kata Kunci: *Triple Entry, Sistem Akuntansi, Pendidikan*

1 PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus menjadi indikator kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas juga merupakan salah satu tujuan dalam 17 agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyejahterakan masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia di dunia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentunya juga ikut dalam kolaborasi antar negara ini agar tidak mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan sumber daya manusianya.

Dalam proses pembangunan pendidikan yang berkualitas tersebut, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masalah, seperti kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang tak diiringi oleh kemampuan sumber daya manusianya, penggunaan sistem informasi yang masih tertinggal dan belum terintegrasi, sistem komunikasi yang lemah, hingga kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang pendidikan yang masih belum lengkap. Kompleksitas permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia ini tentunya merupakan suatu bias yang pengembangan dan perbaikannya merupakan proses yang dinamis serta memerlukan waktu dalam jangka panjang. Aspek mendasar yang harus diutamakan dalam proses pembangunan sistem pendidikan ini adalah percepatan penggunaan sistem informasi yang tepat guna.

Sebuah organisasi/badan usaha, termasuk yang bergerak di bidang jasa, dagang, manufaktur, bahkan entitas nirlaba sekalipun haruslah memiliki sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik dan dapat memberikan informasi dan data secara lengkap mengenai aspek-aspek fundamental dalam organisasi tersebut sehingga nantinya dapat

membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dan informasi tersebut disajikan secara lengkap dan jelas di sistem informasi entitas tersebut, khususnya di sistem akuntansi.

Sistem akuntansi pada sebuah entitas pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu entitas pendidikan, tidak bisa hanya diukur dari pencapaian peserta didiknya saja, namun perlu diperhitungkan juga berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproses peserta didik tersebut. Apalagi dinamika dari entitas pendidikan itu sendiri yang sangat dinamis, mengharuskan mereka harus mempunyai sistem akuntansi yang dapat memproses semua data biaya dan anggaran dengan lebih efektif dan efisien.

Sistem akuntansi yang saat ini dikembangkan adalah sistem *double entry* dimana pencatatannya harus disimpan pada kolom debit dan kredit. Bentuk dari metode ini digunakan dan dikembangkan karena kemampuannya untuk menghindari angka negatif. Namun seiring dengan kemajuan zaman, kebutuhan dan tuntutan masyarakat pun ikut berkembang, demikian pula dengan para pemakai laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan menganggap bahwa bentuk laporan keuangan yang ada saat ini belum cukup memuaskan mereka. Laporan keuangan sekarang (yang disusun dengan menggunakan *double entry system*) hanya memberikan informasi mengenai masa lalu (ekuitas) dan masa sekarang (aktiva), sedangkan para pemakai laporan keuangan juga membutuhkan informasi mengenai masa depan.

Karena permasalahan tersebut hadirilah *triple entry bookkeeping system* sebagai wujud pengembangan dari sistem yang ada sebelumnya (Yuji Ijiri, 1982). Dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak jauh berbeda dari *double entry* karena hanya

ada tambahan kolom trebit sehingga persamaannya menjadi debit, kredit, dan trebit. Akun tambahan trebit ini memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat memahami tentang sumber pendapatan dan beban yang dihasilkan. Dengan melaporkan informasi mengenai ketiga dimensi tersebut, maka para pemakai laporan keuangan dapat memiliki gambaran mengenai kondisi di masa mendatang sehingga mereka tidak perlu cemas ataupun ragu dengan dana yang telah mereka investasikan di perusahaan (Elvi, 2005). Penggunaan *triple entry bookkeeping* juga dapat mengurangi risiko penipuan atau kesalahan lainnya yaitu dengan menjaga agar setiap pencatatan tidak terjadi bias.

Berdasarkan uraian diatas dan didukung oleh pernyataan Cai, C.W (2019) yang mengemukakan bahwa penerapan *triple entry system* yang tepat secara fundamental dapat meningkatkan penggunaan akuntansi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis implementasi *triple entry bookkeeping* terhadap sistem akuntansi dalam entitas pendidikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “*Treping System (New Trebit for Bookkeeping System): Implementasi Triple Entry Accounting dalam Sistem Entitas Pendidikan.*”

2 KAJIAN LITERATUR

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals merupakan suatu agenda pembangunan dunia yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan manusia secara global dan universal yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar PBB dengan kolaborasi bersama oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Agenda yang terdapat dalam SDGs tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan untuk 15 tahun ke depan yang didalamnya mencakup 17 tujuan dan 169 target guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi

kesenjangan dan melindungi lingkungan (Bappenas, 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang juga dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, melakukan pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Annur (2018) menyatakan bahwa dalam 17 tujuan SDGs tersebut, pendidikan berkualitas merupakan salah satu programnya, tepatnya pada SDGs nomor 4. Poin ini bertujuan untuk menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata juga mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. SDG-4 ini meliputi berbagai aspek pendidikan, mulai dari kontribusi; kualitas dan hasil pembelajaran; pembangunan sekolah; kualitas guru; kebersihan dan keamanan di sekolah; dan komitmen terhadap nilai-nilai kewarganegaraan global dalam pendidikan serta perbaikan aspek-aspek dalam sistem pendidikan lainnya yang dinilai masih kurang maksimal secara keseluruhan.

Triple Entry Bookkeeping for Accounting

Menurut Elvi (2005), *triple entry bookkeeping system* adalah pengembangan dari *double entry bookkeeping system*. *Triple entry bookkeeping system* mempunyai dua jenis yaitu *temporal triple entry bookkeeping system* dan *differential triple entry bookkeeping system*. Pada *temporal triple entry bookkeeping system* ada sebuah dimensi baru yang ditambahkan yaitu dimensi anggaran (*budget*) yang berfungsi sebagai kolom untuk mencatat seluruh kejadian atau transaksi yang

diharapkan akan terjadi pada periode yang akan datang. Nantinya sistem pencatatan ini akan membentuk persamaan *triple entry* baru yaitu:

$$Wealth = Capital = Budget$$

Triple entry bookkeeping ini mengenalkan penggunaan 3 kolom dalam akun penjurnalan transaksinya, yaitu debit, kredit, dan trebit. Akun tambahan trebit ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara kontekstual atas pendapatan dan beban yang dihasilkan. *Triple entry bookkeeping* ini diperkenalkan pertama kali oleh Yuji Ijiri karena ia menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dari sistem *double entry* ini, diantaranya yaitu masih digunakannya data historis atau data sebelumnya dalam memprediksi mengenai apa yang akan terjadi pada perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Yuji, terdapat persamaan baru, yaitu:

$$Past = Present = Future$$

Maksud dari persamaan tersebut adalah transaksi historis di masa lampau perusahaan harus mampu merepresentasikan kondisi perusahaan saat ini, begitu pula transaksi perusahaan saat ini diharapkan dapat memberikan data yang prediktif tentang keadaan perusahaan di masa depan sehingga dapat membantu pemangku kepentingan yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya sebagai output dalam sebuah sistem akuntansi, laporan keuangan yang menerapkan penggunaan *triple entry bookkeeping* juga dapat mengurangi risiko penipuan atau kesalahan lainnya karena telah memvalidasi setiap pencatatan transaksi sehingga nantinya tidak terjadi bias.

Sistem Akuntansi Dalam Entitas Pendidikan

Sistem akuntansi adalah sebuah sistem yang memberikan output berupa informasi keuangan dalam menunjang

proses pengambilan keputusan. Peran dan fungsi sistem akuntansi dalam dunia pendidikan yaitu menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, sehingga nantinya akan berguna ketika pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak entitas pendidikan tersebut.

Sebuah entitas pendidikan pada umumnya mempunyai karakteristik usaha yaitu, bersifat nirlaba atau *non-profit* sehingga bentuk badan hukum yang paling tepat bagi sebuah lembaga pendidikan adalah yayasan. Dalam menjalankan kegiatannya, sebuah entitas pendidikan tidak semata-mata digerakkan untuk mencari laba. Meskipun *not-for-profit* juga harus diartikan *not-for-loss*. Oleh karena itu selayaknya sebuah entitas pendidikan tidak defisit. Adapun jika surplus, maka surplus tersebut akan dikembalikan kembali untuk pemenuhan kebutuhan publik bukan untuk memperkaya pemilik entitas tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sendiri telah mengatur mengenai standar akuntansi tentang organisasi nirlaba pada PSAK 45. Poin yang paling membedakan antara organisasi nirlaba dan organisasi bisnis lainnya terletak pada laporan keuangannya. Laporan keuangan pada entitas nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini bisa dianalogikan dengan laporan aktivitas. Kemudian entitas nirlaba juga tidak memiliki laporan perubahan ekuitas seperti entitas bisnis. Hal ini dikarenakan sebuah entitas nirlaba tidak dikuasai oleh entitas manapun. Ekuitas dalam entitas nirlaba juga bisa dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas. Jadi, komponen dalam laporan keuangan bagi entitas nirlaba terdiri dari 4, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pada dasarnya, komponen yang terdapat pada laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta CALK antara

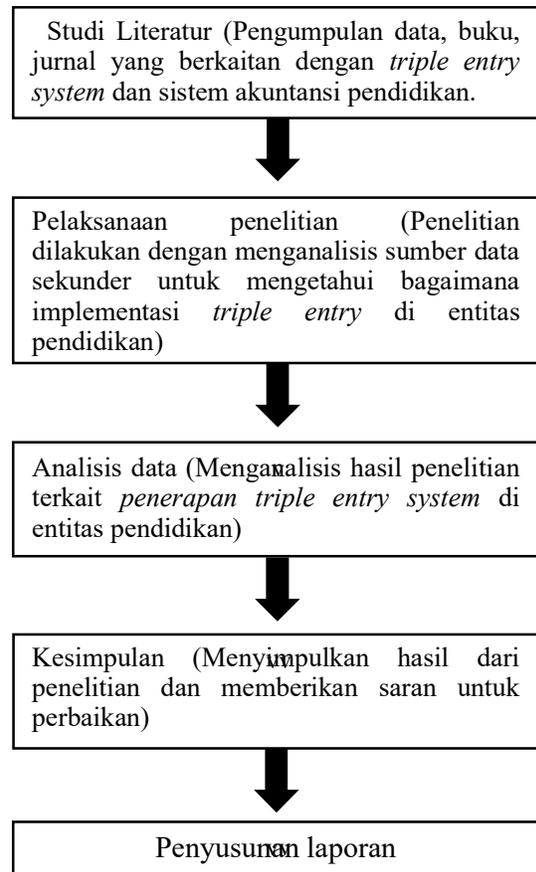
entitas bisnis biasa dan entitas nirlaba adalah sama. Namun pada laporan aktivitas, terdapat informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3) keuntungan dan kerugian, dan (4) reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Dalam laporan aktivitas ini pula, aspek pendapatan akan disajikan sebagai penambah aset bersih yang tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. Sedangkan aspek beban akan disajikan sebagai pengurang aset bersih yang tidak terikat. Selanjutnya untuk komponen sumbangan dapat disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, yang tergantung pada keberadaan pembatasan itu sendiri. Jika terdapat sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak berlaku lagi di periode yang sama, maka sumbangan tersebut dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat dengan syarat harus disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Penggunaan akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memanglah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Maka dari itu, jika diimplementasikan secara tepat dan akurat maka akan dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah, serta menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan.

3 METODE PENELITIAN

Secara umum langkah penelitian ini akan ditampilkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku, literatur, majalah, artikel, jurnal akuntansi, buletin, makalah, peraturan, dan juga website yang mendukung penelitian. Data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh penulis dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. *Textbook*, buku-buku, dan website yang mendukung penelitian.
- b. Literatur berupa majalah, surat kabar, artikel, jurnal, buletin, makalah, dan sebagainya.

- c. Referensi atau rujukan dari berbagai pihak

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan Implementasi *triple double bookkeeping* terhadap sistem akuntansi dalam entitas pendidikan dengan sumber-sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka, baik melalui buku-buku jurnal, majalah, tulisan ilmiah, dan akses internet yang dinilai relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Treping System* Pada Sistem Akuntansi di Entitas Pendidikan

Treping System (New Trebit for Bookkeeping System) adalah konsep ide sistem yang berasal dari *triple entry bookkeeping* sebagai wujud pengembangan dari *double entry bookkeeping system* (Yuji Ijiri, 1982). Dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak jauh berbeda dari *double entry* karena hanya ada tambahan kolom trebit sehingga persamaannya menjadi debit, kredit, dan trebit. Akun tambahan trebit ini memungkinkan para pemakai laporan keuangan memiliki pemahaman tentang darimana pendapatan dan beban dihasilkan. Dengan melaporkan informasi mengenai ketiga dimensi tersebut, maka para pemakai laporan keuangan dapat memiliki gambaran mengenai kondisi di masa mendatang sehingga mereka tidak perlu cemas ataupun ragu dengan dana yang telah mereka investasikan di perusahaan (Elvi, 2005). Penggunaan *triple entry bookkeeping* ini juga memberikan keuntungan karena dapat meminimalisir terjadinya risiko penipuan atau kesalahan lainnya dengan menjaga setiap pencatatan tidak terjadi bias. Oleh karena keunggulan yang dimiliki oleh *triple entry bookkeeping* inilah yang membuat banyak entitas bisnis maupun nonbisnis sudah mulai menerapkannya agar sistem akuntansi yang mereka

operasikan menjadi lebih efektif dan efisien. Pendidikan sebagai entitas yang berorientasi *non-profit* atau sektor publik tentunya juga dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang memadai agar dapat memberikan informasi tentang kegiatan keseluruhan organisasi kepada *stakeholder*.

Menurut Mediaty (2013), laporan keuangan yang disusun oleh entitas pendidikan harus memperhatikan karakteristik khusus akuntansi untuk organisasi nirlaba sehingga laporan keuangannya akan mengacu pada sistem akuntansi yang diterapkan di lembaga yang bersangkutan serta memperhatikan sistem akuntansi negara Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan No. 45) yakni terkait bagaimana pelaporan keuangan di entitas nirlaba yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Berdasarkan PSAK No. 45, entitas nirlaba harus menyajikan 4 jenis laporan keuangan diantaranya:

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan bagi sebuah entitas nirlaba berisikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih serta beberapa informasi lainnya untuk suatu periode tertentu. Informasi ini ditujukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti para anggota entitas tersebut, termasuk pula para kreditur, donatur/penyumbang dan pihak-pihak lainnya. Melalui laporan posisi keuangan ini, dapat dinilai apakah entitas tersebut dapat melanjutkan kegiatan utama mereka berupa pelayanan jasa secara berkesinambungan. Dapat pula diketahui bagaimana likuiditas aset dan fleksibilitas hutang, hingga pendanaan eksternal lainnya dari entitas tersebut.

Komponen laporan keuangan bagi entitas nirlaba kurang lebih sama dengan entitas lainnya, namun komponen ekuitas digantikan dengan

komponen aset bersih atau neto. Aset bersih ini terdiri atas 3 pengelompokan yaitu aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih terikat permanen. Informasi mengenai parameter pengelompokan aset bersih tersebut biasanya akan dilampirkan ke dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan aktivitas

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa pada laporan posisi keuangan entitas nirlaba, komponen ekuitas diasosiasikan dengan aset bersih. Dan nilai akhir dari aset bersih tersebut didapatkan dari pencatatan yang disajikan dengan rinci pada laporan aktivitas ini. Selain itu, pada laporan aktivitas juga memuat komponen pendapatan dan beban. Semua pendapatan pada laporan aktivitas haruslah disajikan secara bruto, termasuk didalamnya berupa pendapatan yang berasal dari sumbangan, jasa layanan dan penghasilan investasi. Sedangkan untuk komponen beban terdiri atas beban terkait dengan program pemberian jasa dan beban yang terkait dengan aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung disini mencakup aktivitas manajemen dan umum, aktivitas pencarian dana, serta aktivitas pengembangan anggota.

c. Laporan arus kas

Penyajian laporan arus kas untuk entitas nirlaba tidak mempunyai perbedaan yang berarti jika dibandingkan dengan laporan arus kas entitas lainnya, dan penyajiannya sudah diatur dalam PSAK No. 2 tahun 2015 tentang laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan bagaimana pendanaan serta arus kas masuk dan keluar dari entitas tersebut. Hal ini memungkinkan pihak pengambil keputusan dapat mengukur berapa banyak yang tersedia untuk membayar pengeluaran operasional pada waktu tertentu.

Komponen laporan arus kas pada entitas nirlaba juga terbagi menjadi

aktivitas operasi, pembiayaan, dan investasi untuk menunjukkan bagaimana uang tunai bergerak di entitas tersebut. Laporan ini juga dapat dengan mudah menunjukkan bagaimana entitas tersebut menggunakan dana yang diterimanya dari penggalangan dana, pencairan hibah, dan aliran pendapatan lainnya melalui analisis dari laporan ini.

d. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan dalam entitas nirlaba akan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi tentang unit-unit transaksi yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Selain itu catatan atas laporan keuangan juga berisikan informasi (profil) entitas tersebut secara umum, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangannya, penjelasan dari setiap akun yang dianggap membutuhkan keterangan lebih lanjut, serta asersi dalam laporan keuangan entitas tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat bahwa laporan keuangan entitas nirlaba tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis, namun terdapat beberapa perbedaan utama, yakni:

a. Entitas nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat digantikan dengan laporan aktivitas. Pada umumnya informasi sentral dalam laporan laba rugi tergolong ke dalam komponen laba atau rugi dalam satu periode entitas. Sedangkan untuk informasi sentral dalam laporan aktivitas tergolong ke dalam perubahan aset neto.

b. Entitas nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya entitas bisnis. Hal ini dikarenakan entitas nirlaba tidak dikuasai oleh entitas manapun. Ekuitas dalam entitas nirlaba bisa digantikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas.

Siklus akuntansi di entitas nirlaba yang pada pembahasan ini adalah entitas

pendidikan pada dasarnya sama dengan siklus akuntansi pada umumnya, namun penerapannya di lapangan mengalami beberapa perubahan, agar sesuai dengan tujuan pencatatan akuntansi dan status entitas yang bersangkutan. Pelaporan keuangan di sektor pendidikan harus didasarkan pada PSAK 45. Oleh karena penggunaan sistem akuntansi memiliki peran penting di sektor pendidikan maka *Treping System* hadir sebagai konsep ide yang akan diimplementasikan ke dalam sistem akuntansi agar penggunaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, pengimplementasian *Treping System* dalam sistem akuntansi entitas pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Penyedia Informasi Anggaran

Sistem pencatatan *triple entry* merupakan sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Dengan adanya pencatatan *triple entry* ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan dan pengeluaran entitas pendidikan. Oleh karena itu, sistem akuntansi ini berperan penting untuk menyediakan berbagai informasi yang akurat dan juga tepat waktu terkait anggaran dan kegiatan keuangan entitas pendidikan yang nantinya akan berguna sebagai dasar pengukuran performa guna menentukan tingkat ketaatan pada pihak otorisasi anggaran dan demi tujuan akuntabilitas. Dengan Informasi anggaran yang valid maka kepala institusi pendidikan dapat melakukan pengambilan keputusan seperti menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan ATK (Alat Tulis Kantor) yang harus ada di bagian perlengkapan, dan lain-lain.

b. Validasi Transaksi Secara Otomatis

Ian Grigg seorang kriptografer pada tahun 2005 menyatakan bahwa entitas dalam bentuk apapun tidak boleh menjadi satu-satunya pencatat transaksi keuangan karena akan memungkinkan terjadinya

kesalahan dan penipuan yang tidak disengaja dalam akuntansinya, sehingga memerlukan *triple entry* yang diamankan secara kriptografis dan dapat direkam pada saat yang sama untuk transaksi antar entitas. Dalam *triple entry*, debit yang dicatat oleh satu entitas adalah kredit yang dicatat oleh pihak lain.

Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan transaksi keuangan antara entitas pendidikan dan pihak donatur. Pihak donatur akan mendonasikan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada pihak entitas pendidikan untuk membeli komputer. Dalam sistem *double entry*, faktur akan ada di buku besar masing-masing dari kedua pihak tersebut: kredit untuk pihak donatur dan debit untuk entitas pendidikan. Namun dalam *triple entry system*, entitas pendidikan menulis tanda terima di *public ledger* dengan tanda tangan. Pada saat yang sama, pihak donatur melihat tanda terima ini, menyetujui, dan menandatangani juga. Transaksi tersebut dicatat secara permanen dalam *public ledger*, baik pihak donatur maupun entitas pendidikan tidak dapat merekam hal yang berbeda dalam buku besar mereka sendiri, mereka juga tidak dapat mengubah catatan internal nanti. Akibatnya, *triple entry* memvalidasi transaksi ini secara otomatis.

Akun Kas Pihak Donatur		Akun
Debit	Kredit	Debit
	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Public Ledger		
Pihak Donatur		Entitas Pendidikan

Gambar 2. Contoh sederhana Triple Entry Accounting

c. Public Ledger (Akun Terintegrasi) Berbasis Teknologi Blockchain

Penerapan *triple entry accounting* dengan *blockchain* menunjukkan bahwa pihak ketiga yang terpercaya dan netral tidak selalu diperlukan, karena public ledger dalam *triple entry* ini dapat didesentralisasi, tidak dapat diubah, aman, dan otomatis menggunakan *blockchain* (Grigg,

2005). Sederhananya, *blockchain* adalah jenis database lain untuk mencatat transaksi yang disalin ke semua komputer di jaringan yang berpartisipasi (Deloitte, 2016). Dalam *public ledger* seperti itu, ketika ada catatan perubahan kepemilikan aset, *public ledger* diperbarui dan akan dibagikan kepada semua orang. Oleh karena itu, buku besar yang didistribusikan ini sesuai dengan mekanisme *triple entry* yang diusulkan oleh Grigg (2005), karena transaksi bisnis antara dua entitas dapat dicatat dalam *public ledger* ini dan kedua entitas dapat melihat *public ledger* yang diperbarui ini. Idealnya, tidak perlu melakukan audit dan rekonsiliasi dengan pihak lain seperti bank dan entitas lainnya, jika semua transaksi dicatat dalam *public ledger* tersebut.

Konsep penting yang lebih meningkatkan *triple entry* (dibandingkan dengan sistem *double entry*) adalah 'kontrak pintar'. Nick Szabo menciptakan istilah 'kontrak pintar' pada tahun 1997. Menurut Brown (2015), kontrak pintar adalah kontrak digital yang persyaratannya disepakati oleh dua pihak dan diprogram ke dalam *blockchain*. Token *blockchain* adalah *cryptocurrency* terdesentralisasi yang memungkinkan orang untuk mentransfer uang tanpa pihak terpusat seperti bank. *Cryptocurrency* adalah aplikasi asli dari teknologi *blockchain* di industri keuangan. Oleh karena itu, dengan kontrak pintar yang disematkan, *public ledger* yang dibangun di atas *blockchain* jauh lebih dari sekadar buku besar sederhana dengan informasi yang direkam. Buku besar ini dapat menjalankan sendiri dan/atau menegakkan sendiri perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. Buku besar ini dapat menyimpan aset pelanggan dan juga dapat mengirimkan nilai unit akun sistem menjadi uang (dalam bentuk token). Oleh karena itu, *public ledger* yang terintegrasi dengan kontrak pintar ini adalah buku besar yang 'hidup'. Ia bertindak sendiri berdasarkan 'kode program' yang telah ditentukan

sebelumnya, mengirim informasi, merekam informasi, dan mengeksekusi transaksi.

d. Peningkatan Kepercayaan dan Transparansi

Mari kita pertimbangkan kembali transaksi antara entitas pendidikan dan pihak donatur sebelumnya untuk melihat bagaimana akuntansi *triple entry* dapat merevolusi akuntansi konvensional dan prosedur audit. Dalam sistem *double entry* dengan bank terpusat sebagai pihak ketiga, setelah pihak donatur memberikan donasinya kepada entitas pendidikan, pihak donatur akan meminta bank untuk mengeluarkan cek (dokumen 1) kepada entitas pendidikan. Setelah bank memverifikasi transaksi ini, bank mentransfer Rp 10.000.000 dari rekening bank pihak donatur ke rekening bank entitas pendidikan. Pada saat yang sama, bank mengeluarkan dua salinan tanda terima (dokumen 2 dan dokumen 3) kepada entitas pendidikan dan pihak donatur. Setelah menerima tanda terima, entitas pendidikan dan pihak donatur memperbarui entri internal mereka.

Untuk transaksi sepele seperti itu, ada banyak ruang untuk kesalahan dan/atau penipuan. Mereka berasal dari dua sumber utama, (1) informasinya tidak cukup transparan (satu pihak dapat 'mengubah' informasi tersebut dan oleh karena itu auditor perlu memverifikasi informasi melalui sumber yang berbeda; misalnya, alih-alih jumlah yang benar sebesar Rp 10.000.000, entitas pendidikan dapat mencatat Rp20.000.000 dalam pendapatan di buku besarnya). Kedua, aktivitas kecurangan dapat terjadi di sekitar transaksi ini (misalnya, pihak donatur memanipulasi jumlah donasi yang mereka berikan kepada pihak yang bertanggung jawab). Oleh karena itu, auditor harus memeriksa dokumen asli, merekonsiliasi jumlah transaksi dengan bank, dan memverifikasi

dokumen dengan pihak entitas pendidikan (lihat Gambar 2 untuk ilustrasi).

Sebaliknya, dalam kerangka akuntansi *triple entry*, entitas pendidikan dan pihak donatur menentukan sebelumnya aturan perjanjian pada kontrak digital yang dijalankan sendiri: pihak donatur memberikan Rp10.000.000 setelah entitas pendidikan menyediakan layanan. Keduanya menandatangani kontrak pada public ledger ini. Setelah layanan selesai, entitas pendidikan dan pihak donatur menandatangani kontrak lagi, *public ledger* diperbarui, dan program komputer akan mengirimkan Rp10.000.000 kepada entitas dagang (lihat Gambar 3 untuk ilustrasi).



Gambar 3. Transaksi dengan sistem akuntansi double entry



Gambar 4. Transaksi dengan sistem akuntansi Triple Entry

Contoh di atas menunjukkan keuntungan dari sistem akuntansi *triple-entry* dengan kontrak pintar yang dapat menyelesaikan masalah kepercayaan dan transparansi mendasar yang mengganggu sistem akuntansi saat ini. Oleh karena itu, kerangka kerja baru ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk audit dan biaya terkait. Akibatnya, lebih banyak upaya dapat diarahkan pada tindakan untuk mencegah penipuan daripada hanya memverifikasi informasi. Kerangka kerja baru ini mungkin tidak mencegah semua jenis penipuan (seperti skema Ponzi) tetapi secara dramatis dapat mengurangi penipuan internal dan meningkatkan efisiensi operasional entitas pendidikan.

Sistem Akuntansi Pendidikan Berbasis Treping System Sebagai Solusi Strategis Mewujudkan Tujuan SDGs Terkait Pendidikan Berkualitas

Kualitas pendidikan pada dasarnya dapat diukur dari berbagai aspek, yaitu: (1) output, seperti: pelayanan sekolah, prestasi lomba dan belajarnya, serta (2) outcome para lulusan, seperti: persentase jumlah alumni yang berhasil melanjutkan sekolah, kecepatan mereka mendapatkan pekerjaan, besarnya gaji kerja pertama yang diterima, dan sebagainya. Sehingga kualitas pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur seberapa berhasilnya setiap sekolah dalam melaksanakan program kerja dengan inputan sebagai faktor pendukungnya.

Namun demikian pada kenyataannya, para evaluator masih seringkali lupa dan atau mengabaikan keberadaan berbagai faktor pendukung (faktor inputan) dalam menentukan mutu pendidikan. Faktor inputan ini seperti: jumlah dan kualitas sarana prasarana sekolah, kemampuan awal peserta didik sebagai inputan serta dana pendidikan di sekolah itu. Dengan kondisi tersebut, maka sekolah yang unggul akan selalu diduduki oleh sekolah yang memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap. Oleh karena itu, dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu

entitas pendidikan, tidak bisa hanya diukur dari capaian peserta didiknya saja, namun perlu dipertimbangkan juga berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproses peserta didik tersebut. Meskipun pendidikan merupakan badan hukum yang berorientasi non profit namun tetap saja harus mempunyai sistem akuntansi yang dapat memproses semua data biaya dan anggaran dengan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan. Penggunaan akuntansi yang tepat pasti erat hubungannya dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pembiayaan sekolah, serta meminimalisir dalam sisi pembiayaan pendidikan (Gimin dan Sri Kartikawati 2014). Entitas pendidikan sebagai sebuah entitas non-profit, yang menerima sumber pendapatan dari berbagai pihak, secara tidak langsung juga memberikan banyak celah bagi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, kecurangan hingga tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dan efisien yang diterapkan di dalam entitas pendidikan akan meminimalisir tindak kejahatan tersebut dan tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan mengindikasikan bahwa Indonesia telah mampu mewujudkan salah satu tujuan dalam 17 agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diterapkan oleh PBB untuk menyejahterakan masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia di dunia.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Salah satu tujuan SDGs 2030, pada agenda nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas. Dalam mewujudkan pendidikan berkualitas tersebut banyak aspek yang masih harus diperhatikan, tidak hanya capaian peserta didiknya saja

namun juga efektivitas internal dari sebuah entitas pendidikan itu sendiri. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem informasi yang terintegrasi untuk dapat memproses data dan informasi dengan efektif dan efisien termasuk di dalamnya sistem akuntansi.

Dalam perkembangannya, perlu dilakukan mitigasi perubahan pada sistem akuntansi di entitas pendidikan agar dapat menghasilkan informasi yang terintegrasi dan meningkatkan intensitas kepercayaan publik. Dalam hal ini Treping System hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Treping System yang merupakan sebuah sistem pencatatan dengan metode *triple entry* sangat cocok apabila diimplementasikan dalam entitas pendidikan. Dilihat dari keunggulannya sistem ini dapat membantu entitas pendidikan dalam memperbaiki sistem akuntansi khususnya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan transaksi dan menyelesaikan masalah transparansi mendasar yang mengganggu sistem akuntansi saat ini. Sehingga tidak perlu diadakan lagi proses audit dan rekonsiliasi karena sistem sudah memverifikasi data secara otomatis.

Terlepas dari keunggulan tersebut, dalam melakukan penelitian ini penulis masih menemui beberapa kendala saat mengumpulkan bahan rujukan karena penelitian akademis tentang topik ini masih sangat terbatas. Salah satu alasan utama kurangnya pengembangan *triple entry* ini karena akuntan profesional dan peneliti akademis masih kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang konsep dan teknologi tersebut. Oleh karena itu, agar penerapan *triple entry* dalam entitas pendidikan dapat terlaksana dengan baik, diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menganalisis berbagai keuntungan lain dari penggunaan *Treping*

System dan juga dapat menggunakan entitas/organisasi yang berbeda dalam implementasi sistem ini sehingga diharapkan penggunaan Treping System ini bukan hanya menjadi konsep semata namun dapat direalisasikan secara konkret.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur kami haturkan kepada Allah SWT karena dengan kesempatan dan kesehatannya, kami dapat menulis dan mempublikasikan riset terkait dengan *Treping System* ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agil Novriansa, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA., CRP. Selaku dosen di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam proses publikasi riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, dkk. (2018). Sustainable Development Goals dan Peningkatan Kualitas Pendidikan. Banjarmasin: Universitas Lampung, 251.
- Brown, R.G. (2015). Model sederhana untuk kontrak pintar. Diperoleh dari <https://gandal.me/2015/02/10/a-model-sederhana-untuk-kontrak-pintar/>.
- Cai, C.W. (2019). Triple entry accounting with blockchain: How far have we come?
- Deloitte. (2016). Blockchain: pengubah permainan untuk proses audit? Diperoleh dari <https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/audit/articles/mt-blockchain-a-game-changer-for-audit.html>
- Elvi. (2005). Realisasi penerapan triple entry bookkeeping system sebagai pengembangan dari double entry bookkeeping system (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya). Diperoleh dari https://repository.unsri.ac.id/2024/8/2/RAMA_62201_01013130066_0008_075703_0026056902_01_front_ref.pdf
- Grigg, I. (2005). Triple Entry Accounting. Diperoleh dari http://iang.org/papers/triple_entry.
- Ijiri, Y. (1986). A Framework for Triple-Entry Bookkeeping. The Accounting Review. Kapil Rana (2020, March 28). Triple entry accounting system: A revolution with blockchain. Diperoleh dari: <https://medium.com/dataseries/triple-entry-accounting-system-a-revolution-with-blockchain-768f4d8cabd8>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi (TPB/SDGs). Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- Mediaty. (2013). The development of accounting education at university of Indonesia. Journal of Humanity 1(1), 82.